

CEO Qantas: Tanda Sudah Divaksin COVID-19, akan Dipersyaratkan bagi Penumpang, Bagaimana Indonesia?

Take it or leave it, that's it

Catatan Redaksi : Walaupun jumlah orang terinfeksi COVID-19 di Australia mencapai jumlah jauh lebih rendah dari pada di Indonesia \pm 28.000 orang (Nopember 2020) dengan tingkat mortality \pm 900 orang, namun pihak maskapai akan memberlakukan persyaratan Tanda Sudah Divaksin. Pernyataan ini berasal dari CEO sebuah maskapai yang masuk kategori terbaik di dunia, Qantas, bukan otoritas atau senator. Tindakan pencegahan ini merupakan sebuah sikap tanggungjawab moral sebagai kepedulian terhadap preventif kesehatan, demi untuk tetap berusaha menurunkan jumlah orang terinfeksi COVID-19 yang walaupun sudah termasuk rendah di dunia yaitu "hanya" mencapai terinfeksi 28.669, meninggal 909 (16 Januari 2021).

Semoga esensi artikel ini dapat menggugah semua pihak di negeri ini (anggota dewan, otoritas dan masyarakat) yang peduli tindakan pencegahan di tengah kondisi penyebaran yang terus memuncak di Indonesia (penambahan harian terinfeksi di hari Rabu, 10/2/2021 mencapai 17.552 orang). Tidak ada istilah **kebijakan kontra produktif**, seperti dinyatakan oleh seorang senator dari partai politik tertentu, sepanjang untuk menyelamatkan nyawa manusia, dalam mematuhi prokes kesehatan, sebagaimana otoritas penerbangan memberlakukan standar keselamatan, selama ini, yaitu, tanpa kompromi.

Penerapan persyaratan semacam itu memang tidak dapat diberlakukan oleh seluruh negara di dunia, mengingat vaksinasi tidak diberlakukan 100% untuk penduduk di sebuah negara, namun tindakan ini sebaiknya hanya akan dilakukan oleh negara yang tingkat penyebarannya COVID-19 di negaranya masih tinggi, atau dengan kata lain disesuaikan dengan tingkat urgensinya. Ketentuan persyaratan bagi penumpang tersebut bersifat sementara, dan pemberlakuannya akan dicabut setelah tingkat penyebarannya mulai menurun. Persyaratan ini nantinya akan ada kekecualiannya, misalnya, tidak diberlakukan terhadap orang yang memang dibenarkan secara medis tidak divaksin.

Masalah yang paling krusial adalah tingkat kepedulian dan kepatuhan masyarakat yang berbeda dalam menjalankan prokes kesehatan di masing-masing negara yang ada di dunia, sebagai contoh, jumlah orang patuh dan disiplin terhadap prokes dalam penanggulangan COVID-19 di Australia berbeda dengan di Indonesia (% terhadap populasi). Apa sebenarnya yang terjadi di Indonesia?.

Sebuah lembaga survei terpercaya di Indonesia telah menjawabnya. Lembaga survei tersebut baru-baru ini merilis hasil temuannya bahwa vaksinasi yang begitu luhur artinya bagi kesehatan dan pembentukan kekebalan mayoritas orang banyak untuk menyelamatkan bangsa ini, namun oleh sejumlah responden (\pm 40%), ditolak. Sebenarnya, bila alasan penolakan ini disebutkan secara jujur adalah faktor medis, maka berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tidak akan pernah ditemukan pada orang yang sehat. Penelitian melalui pengujian klinis vaksin dan efek sampingnya di Indonesia tersebut telah dilakukan oleh semua badan resmi yang berwenang (authorized) dan profesional terhadap orang yang (diperkenankan untuk) divaksin, yaitu orang yang sehat atau sekurang-kurangnya orang yang memiliki penyakit komorbid namun yang terkontrol, secara resmi sudah dilakukan.

Berkali-kali ditegaskan, bahwa efek samping dan/atau akibat lainnya yang membahayakan kesehatan seseorang, atas penggunaan vaksin tersebut adalah TIDAK DITEMUKAN.

Hal itu dibuktikan setelah melalui ujian yang ketat, teliti, panjang dan melelahkan oleh petugas profesional yang terkait, nakes dan BPOM. Ulasan lebih lanjut dari lembaga survei tersebut, yang menemukan data bahwa “luka yang mendalam” akibat perseteruan di saat Pilpres 2019, terus membekas dan inilah yang dijadikan faktor penyebabnya. Gambaran umum ini sekaligus menunjukkan, bahwa, pengejawantahan nilai-nilai demokrasi di negeri ini, belum dewasa. Ingat pilpres akan diulang setiap 5 tahun, yang artinya, akan selalu ada kesempatan untuk menjadi pemimpin di negeri yang demokratis ini, asalkan prinsipnya adalah, yang terbaik dan yang diterima oleh mayoritas masyarakat pemilih (>50%).

Emergency use authorization (EUA = otorisasi penggunaan di saat emergency) yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di bawah pengawasan WHO (World Health Organization = Badan Kesehatan Dunia), pada Senin (11/1/2021), secara resmi membuktikan bahwa vaksin tersebut sudah teruji keamanannya dan efikasinya (khasiat) untuk dipergunakan di Indonesia.

Selanjutnya, lembaga survei tersebut juga menyatakan besaran orang yang terkait hasil temuannya, bahwa ada sekitar sejumlah 41% responden yang menolak divaksin. Dari hasil temuannya itu terdata bahwa alasan penolakannya adalah terkait dengan faktor non-medis yang sulit diukur pertanggungjawabannya. Padahal, dengan diterbitkannya EUA vaksin COVID-19 secara resmi tersebut, berarti vaksin ini sudah memenuhi syarat secara medis, legal dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga diperbolehkan digunakan untuk semua lapisan masyarakat luas di Indonesia.

*Pandemi COVID-19 di Indonesia adalah benar-benar masalah serius untuk bangsa ini, maka melakukan tindakan penolakan tersebut dengan alasan yang bukan faktor medis, bukanlah sikap yang terpuji dari warga negara NKRI, apalagi bila dilakukan oleh seorang yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan seperti dokter dan paramedis yang telah disumpah ketika akan diangkat untuk menjalankan profesinya. Guna mengatasi masalah ini, demi imunitas bangsa (herd immunity yang distandarkan WHO yaitu minimal 70% dari populasi), diperlukan ketegasan yang terukur dari semua lembaga pemerintah secara bersama-sama dan saling mendukung (integrated) demi menyelamatkan bangsa dari pandemi ini, yang di sektor penerbangan dilakukan oleh otoritas dengan menerapkan kebijakan **mewajibkan sertifikasi telah divaksin bagi semua penumpang pesawat, baik domestik maupun internasional**. Take it or leave it, that's it.*

Jangan sampai kita tersandera hanya oleh alasan penolakan divaksin yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari aspek mana pun seperti, MEDIS, sosial, budaya, hankam, politik, ekonomi, dan hukum, yang dilakukan sejumlah orang terhadap kebijakan pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan yang menyeluruh bagi bangsa. Kebijakan yang tegas itu adalah sebuah konsekuensi logis untuk menyelamatkan bangsa ini yang harus dicermati oleh otoritas penerbangan, karena fasilitas perjalanan melalui udara (pesawat udara dan bandar udara), tidak dapat dielakkan sebagai tempat berkerumun lebih dari 5 orang, sehingga, dapat menjadi lokasi penularan. Tindakan keharusan yang dilakukan semacam ini, bagi penerbangan sipil adalah hal yang lumrah terjadi untuk menerapkan standar demi terwujudnya keselamatan dan kesehatan penumpang pesawat.

Di Indonesia, terkait dengan penanggulangan COVID-19, saat ini baru sampai sebatas kewajiban pemeriksaan COVID-19 khususnya terhadap penumpang pesawat udara di Indonesia dengan menggunakan alat pengetes GeNose. Kewajiban ini baru akan diberlakukan dalam waktu dekat, walaupun demikian, aturan ini adalah benar dan pelaksanaannya patut didukung oleh semua pihak. Tidak ada rotan, “lidi” pun jadi.

Otoritas kesehatan di negeri ini pun bersikap dengan memberikan pernyataan yang berbeda dengan ketika di saat awal. Dikutip dari harian Kompas 15/3/2021:” wacana sertifikat vaksin COVID-19 sebagai syarat bepergian dengan menggunakan pesawat atau keluar kota yang awalnya sempat diutarakan akan diberlakukan, kini, dinyatakan, bahwa sertifikat vaksin COVID-19 belum bisa (dipergunakan).

Persyaratan surat tanda sudah divaksin bagi penumpang pesawat (sertifikasi) ini, bukan hanya diberlakukan oleh Qantas, Australia saja, namun Kanada dan juga 17 negara di dunia telah melakukannya. Bahkan 27 negara Uni Eropa akan memberlakukan hal yang sama dalam waktu dekat. Ke-17 negara tersebut sepakat memberlakukan persyaratan sertifikasi ini dalam bentuk paspor khusus (lihat gambar di bawah)



Terkait dengan ketentuan persyaratan sertifikasi sudah di vaksin, Otoritas Kanada (TC = Transport Canada) mendenda dua penumpang pesawat lantaran mereka menyerahkan bukti palsu hasil tes COVID-19 sebelum melakukan penerbangan ke negara tersebut, kejadian pertama sejak kewajiban tes negatif sebelum keberangkatan diperkenalkan pada Januari, demikian regulator transportasi Kanada, Kamis 18/2/2021. Salah satu penumpang didenda 10.000 dolar Kanada (sekitar Rp110,5 juta), sedangkan satunya lagi dikenai denda 7.000 dolar Kanada (sekitar Rp77,4 juta) karena memalsukan tes COVID-19 ketika keduanya melalukan perjalanan dari Meksiko pada

23 Januari, menurut pernyataan Transportasi Kanada. Keduanya juga membuat pengakuan bohong soal status kesehatan mereka sebelum terbang ke Kanada, usai dinyatakan positif COVID-19 beberapa hari sebelum keberangkatan, katanya.

Banyak negara, selain Kanada, menerapkan syarat wajib tes COVID-19 bagi para pelancong. Kanada memiliki sejumlah aturan perjalanan yang paling ketat di dunia, yang bertujuan mencegah penyebaran virus corona, seperti karantina wajib selama 14 hari.

Covid: Vaccination will be required to fly, says Qantas chief

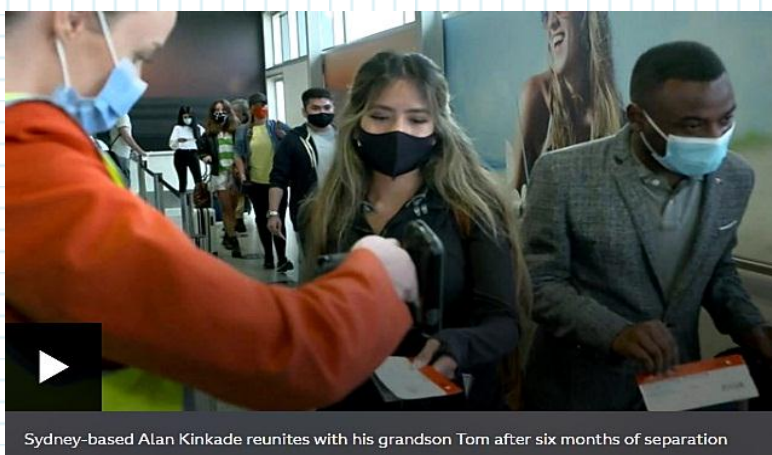
BBC News

Published 23 November 2020



“Qantas boss Alan Joyce says requiring proof of vaccination before boarding flights is likely to be common”

International air travellers will in future need to prove they have been vaccinated against Covid-19 in order to board Qantas flights, the airline says.



Sydney-based Alan Kinkade reunites with his grandson Tom after six months of separation

The Australian flag carrier's boss, Alan Joyce, said the move would be "a necessity" when vaccines are available. "I think that's going to be a common thing talking to my colleagues in other airlines around the globe," he said. Australia shut down its international borders early in the pandemic and required those returning to quarantine.

The country has more recently relied on lockdowns, widespread testing and aggressive contact tracing to push daily infections nationwide close to zero. In an interview with Australia's Nine Network on Monday, Mr Joyce said Qantas was looking at ways of changing its terms and conditions for international travellers as the industry, which has been hit hard by travel restrictions, looks at ways of moving forward. "We will ask people to have a

vaccination before they can get on the aircraft... for international visitors coming out and people leaving the country we think that's a necessity," he told the broadcaster. "There are always exemptions for any vaccine on medical grounds, but that should be the only basis," he told radio station 3AW. That same month, Qantas reported an annual loss of almost A\$2bn (\$1.46bn; £1bn) because of the impact of the coronavirus pandemic. Mr Joyce said at the time that trading conditions were the worst in the airline's 100-year history and that "the impact of Covid on all airlines is clear - it's devastating".

On Monday, the Australian state of New South Wales (NSW) reopened its border with neighbouring Victoria for the first time since infections soared in Victoria's state capital, Melbourne, in July. Flights between the city and the NSW capital Sydney - normally one of the world's busiest routes - had been cancelled. Sydney-based Alan Kinkade reunites with his grandson Tom after six months of separation. Arriving in Sydney on a Qantas flight for the first time in months, passengers were greeted by people at the terminal holding up signs that read "welcome back". More than 20 additional flights were scheduled between the two states on Monday. "Today is the day I get to meet my four-month-old grandson for the first time," one passenger told the BBC.

Australia has recorded about 900 coronavirus-related deaths and almost 28,000 infections in total.

----- END -----

Sumber: Dikutip sepenuhnya dari BBC News dengan gambar dari Express UK serta narasi pengantar dari [Dunia Menyapa Negeri](#). Kelengkapan definisi dikutip dari Wikipedia dan kutipan dari Kompas serta KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).